

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rendahnya tingkat kesejahteraan menjadi alasan yang sempurna rendahnya Human Development Index (HDI), Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Secara menyeluruh kualitas manusia Indonesia relatif masih sangat rendah, dibandingkan dengan kualitas manusia di negara-negara lain di dunia. Berdasarkan Human Development Report (HDI, 2004) yang menggunakan data tahun 2002, angka Human Development Index (HDI) Indonesia adalah 0,692. Angka indeks tersebut merupakan komposit dari angka harapan hidup saat lahir sebesar 66,6 tahun, angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 87,9 %, kombinasi angka partisipasi kasar jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi sebesar 65 %, dan Pendapatan Domestik Bruto per kapita yang dihitung berdasarkan daya beli sebesar US\$ 3.230. HDI Indonesia hanya menempati urutan ke-111 dari 177 negara .

Dilihat dari dimensi pendidikan tingkat pendidikan yang rendah dipandang sebagai penyebab kemiskinan, dari dimensi kesehatan rendahnya mutu kesehatan masyarakat, dari dimensi ekonomi kepemilikan alat-alat produktif yang terbatas, penguasaan teknologi dan kurangnya keterampilan. Faktor kultur dan struktural juga kerap kali dilihat sebagai elemen penting yang menentukan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Angka kemiskinan di daerah pedesaan sangat dipengaruhi oleh rendahnya

tingkat pendidikan kepala rumah tangga. Menurut data yang disajikan BPS (Badan Pusat Statistik, 2003) memperlihatkan bahwa 72,01% dari rumah tangga miskin di pedesaan dipimpin kepala rumah tangga yang tidak tamat SD, dan 24,32% dipimpin kepala rumah tangga yang berpendidikan SD. Kebutuhan akan pendidikan sangat penting bagi penduduk, sebagaimana dikemukakan oleh Parelius (1978:50) bahwa:

Pendidikan yang memiliki makna bagi kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk adalah pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan dan memiliki daya dukung lingkungan, sehingga dalam memanfaatkan potensi yang tersedia dan secara fragmentaris dan jangka pendek fungsi pendidikan bagi penduduk adalah mempersiapkan pemuda-pemuda untuk mengisi lapangan kerja produktif.

Hubungan tingkat pendidikan dan sumber penghasilan rumah tangga miskin kaitannya sangat erat, sebagaimana dikemukakan oleh Subagio (2001:45) mengemukakan bahwa:

Profil kemiskinan dapat dilihat dari karakteristik ekonominya seperti sumber pendapatan, pola konsumsi atau pengeluaran, dan tingkat beban tanggungan. Profil kemiskinan yang lain yaitu dari karakteristik sosial-budaya penduduk seperti tingkat pendidikan, cara memperoleh air bersih. Sedangkan mengenai penyebaran kemiskinan dapat dilihat dari karakteristik geografinya, yaitu dengan menentukan dimana penduduk miskin terkonsentrasi.

Faktor dalam rumah tangga yang erat kaitanya dengan tingkat pendidikan adalah sumber penghasilan atau pendapatan. BPS (Badan Pusat Statistik, 2003) menunjukkan data dari sumber penghasilan rumah tangga miskin pada tahun 1996 yaitu sumber penghasilan utama dari 63,0% rumah tangga miskin bersumber dari pertanian, 6,4% rumah tangga miskin bersumber dari kegiatan industri, 27,7% rumah tangga miskin bersumber dari kegiatan jasa-jasa termasuk perdagangan.

Sumber penghasilan dari rumah tangga miskin yang rendah mengakibatkan desa mereka menjadi desa tertinggal, dari data BPS (Badan Pusat Statistik, 2003) diperoleh data sekitar 66.000 jumlah desa yang ada di Indonesia, pada tahun 1994 jumlah desa tertinggal mencapai 22.094 desa dan yang berada di daerah pedesaan sekitar 20.951 desa, sedangkan pada tahun 1999 jumlah desa tertinggal mencapai 16.566 dari sekitar 66.000 desa.

Kecamatan Ngamprah merupakan kecamatan yang berada di Kabupaten Bandung Barat dan saat ini menjadi ibu kota Kabupaten Bandung Barat. Kecamatan Ngamprah terdiri dari 11 desa dan jumlah penduduknya 126.616 jiwa. Batas administratif Kecamatan Ngamprah yaitu sebelah utara Kecamatan Cikalong Wetan, sebelah timur Kecamatan Cisarua, sebelah selatan Kecamatan Padalarang, sebelah Barat Kecamatan Padalarang.

Kecamatan Ngamprah merupakan daerah agraris dimana mata pencaharian mereka di domain oleh tani dan buruh tani, namun dalam hal pendidikan mereka sangat kurang bila di bandingkan dengan kecamatan lain yang berdekatan, hal ini dikarenakan produktivitas mereka dalam menghasilkan barang dan jasa tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan anak-anak mereka. Berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2005 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sasaran Wajar Sembilan Tahun adalah dengan target Angka Partisipasi Kasar (APK) 94% dengan siswa kelas 1 SLTP dari 3,67 juta tahun ajaran 2004/2005 menjadi 4,04 juta pada tahun 2009. Berdasarkan pengalaman tahun 2004-2006 khusus untuk daerah Jawa Barat, terdapat empat faktor utama sebagai penyebab rendahnya pencapaian APK dan APM (Angka

Partisipasi Murni) adalah; (1) rendahnya jumlah anak tidak/belum sekolah dari keluarga tidak mampu, (2) rendahnya angka melanjutkan sekolah karena faktor ekonomi, (3) tingginya angka DO siswa karena faktor ekonomi dan (4) rendahnya daya tampung sekolah (Laporan Disdik Jabar, 2005).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Rekapitulasi laporan profil desa Se-Kecamatan Ngamprah, jumlah anak usia 7-12 tahun di Kecamatan Ngamprah anak yang masih sekolah di SD/MI/Sederajat 14775 anak, SMP/MTs/Sederajat 665 anak, tamat SD/MI/Sederajat berjumlah 448 anak, belum pernah sekolah 115 anak, DO (keluar sekolah) 72 anak. Sedangkan pada anak usia 13-15 tahun di Kecamatan Ngamprah anak yang masih sekolah di SD/MI/Sederajat 227 anak, SMP/MTs/Sederajat 5864 anak, SLTA 328 anak, tidak melanjutkan sekolah 457 anak, tamat SMP/MTs/Sederajat 235 anak, DO SMP/MTs/Sederajat 51 anak, DO SD/MI/Sederajat 58 anak dan tidak pernah sekolah 41 anak.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kecamatan Ngamprah

Desa	Jumlah Penduduk Tamatan Sekolah				
	SD	SLTP	SLTA	Diploma	Sarjana
Tanimulya	5.584	5.995	5.905	2.901	3.174
Cilame	405	2.881	2.428	752	252
Cimanggu	1.010	394	219	43	10
Ngamprah	448	279	143	30	11
Margajaya	580	1.353	1.105	33	101
Cimareme	650	2.051	1.009	562	218
Bojongkoneng	5.242	2.571	1.092	49	32
Mekarsari	2.763	2.419	1.727	168	61
Gadobangkong	1.702	4.387	3.650	444	5
Sukatani	169	1.005	623	57	32
Pakuhaji	1.160	3.800	600	20	27
Jumlah	19.713	27.135	18.501	5.059	3.923

Sumber: potensi SDM Kecamatan Ngamprah thn 2006.

Data yang diperoleh dari monografi Kecamatan Ngamprah menunjukkan tingkat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi sangat mengkhawatirkan bila hal ini di biarkan maka Kecamatan Ngamprah akan mempunyai Angka partisipasi kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang kecil dibawah standar. Kecamatan Ngamprah bila dibandingkan dengan Kecamatan lain yang berdekatan yaitu Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cikalong Wetan dan Kecamatan Padalarang, angka beban tanggungan penduduknya lebih banyak yaitu 62.20. Dimana rata-rata bebantanggungan dari 100 orang penduduk yang produktif di Kecamatan Ngamprah akan menanggung 62.20 orang penduduk yang tidak produktif (Badan Pusat Statistik, 2002). Artinya selain menanggung dirinya sendiri menanggung juga keluarga yang belum produktif.

Kesejahteraan penduduk yang berada di Kecamatan Ngamprah, bila dilihat dari pendidikan dan angka beban tanggungan penduduknya dapat menimbulkan masalah dikarenakan indikator kesejahteraan yang ada belum terpenuhi seutuhnya. Adapun indikator dari kesejahteraan penduduk adalah pendidikan, kesehatan, dan gaya hidup (Badan Pusat Statistik, 2002).

Perlunya penelitian ini adalah untuk mencari solusi dengan membuat sebuah penyelesaian masalah dengan memperbaiki pendidikan yang ada di Kecamatan Ngamprah. Dalam penelitian ini desa yang dijadikan sampel ada 3 desa yaitu desa Ngamprah, desa Sukatani, dan desa Bojongkoneng. Ketiga desa tersebut dalam pengamatan Kecamatan Ngamprah merupakan desa yang paling rendah tingkat melanjutkan sekolah atau rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) di bandingkan dengan ke delapan desa lainnya.

Berdasarkan tingkat pendidikan penduduk yang rendah dan indikator tingkat kesejahteraan penduduk belum terpenuhi akan dapat diketahui hubungan antara pendidikan dengan tingkat kesejahteraan penduduk berdasarkan seberapa besar peranan pendidikan dalam upaya mensejahterakan penduduk di Kecamatan Ngamprah dan faktor apakah yang mempengaruhi Angka Partisipasi Sekolah di Kecamatan Ngamprah. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Ngamprah. Peneliti memberi judul pada skripsi ini yaitu “Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Tingkat Kesejahteraan Penduduk di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat (Kajian Hubungan Antara Tingkat Pendidikan dengan Tingkat Pendapatan, Kesehatan, dan Gaya Hidup Penduduk Di Kecamatan Ngamprah)”.

B. Rumusan Masalah

Kecamatan Ngamprah merupakan salah satu lokasi yang mempunyai penduduk miskin terbanyak. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka penulis membatasi permasalahan yang dikaji dengan mengajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Adakah hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat kesejahteraan (pendapatan, kesehatan, dan gaya hidup) penduduk di Kecamatan Ngamprah?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kecamatan Ngamprah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh gambaran mengenai hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat kesejahteraan (pendapatan, kesehatan, dan gaya hidup) penduduk di Kecamatan Ngamprah.
2. Memperoleh gambaran tentang faktor yang mempengaruhi rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kecamatan Ngamprah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat peneliti yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan data dan informasi mengenai hubungan tingkat pendidikan penduduk dengan yang selanjutnya diharapkan dapat berguna bagi penduduk dan peneliti lainnya.
2. Memberikan informasi yang faktual dan aktual mengenai faktor yang mempengaruhi rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk baik untuk pihak-pihak terkait maupun masyarakat luas dan memberikan masukan kepada pemerintahan kabupaten khususnya pemerintahan Kabupaten Bandung agar dapat menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai perencanaan, pelaksanaan, serta penerapan program kependudukan dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

E. Definisi Operasional

Judul yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Hubungan Antara Tingkat Pendidikan dengan Tingkat Kesejahteraan Penduduk di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat (Kajian Hubungan Antara Tingkat Pendidikan dengan Tingkat Pendapatan, Kesehatan, dan Gaya Hidup Penduduk Di Kecamatan Ngamprah)”. Agar tidak terjadi kesalah pahaman istilah yang terkandung pada penelitian, maka peneliti akan memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Tingkat Pendidikan

Pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendidikan formal. Pendidikan formal menurut Undang-undang No.20 tahun 2003 pasal 1 ayat 11 yaitu “...pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi”. Sedangkan Jenjang pendidikan diatur dalam UU RI No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 8 yaitu “...tahap pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan”. Jenjang pendidikan yang dimaksud adalah jenjang pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Penjelasan mengenai pendidikan dasar terdapat dalam UU RI No. 20 tahun 2003 pasal 17 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Penjelasan mengenai pendidikan menengah terdapat dalam UU RI No. 20 tahun 2003 pasal 18 ayat 2 dan 3 sebagai berikut:

- (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
- (3) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Penjelasan mengenai pendidikan tinggi terdapat dalam UU RI No. 20 tahun 2003 pasal 19 ayat 1 sebagai berikut:

- (1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Jadi pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tingkat pendidikan atau jenjang pendidikan formal (SD, SMP, SMA, dan Perguruan tinggi) penduduk di Kecamatan Ngamprah.

2. Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan keadaan seseorang dalam keadaan yang aman, nyaman, tentram dan makmur. Sebagaimana yang dikemukakan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (1983:14) bahwa kesejahteraan adalah "...hal atau keadaan sejahtera: keamanan, keselamatan, ketentraman, kesenangan hidup disebabkan kemakmuran."

Adapun batasan-batasan mengenai indikator kesejahteraan dalam penelitian ini yaitu:

a. Pendapatan

Pada tingkat pendapatan yang sama sebuah rumah tangga dengan jumlah anggota keluarga yang relatif banyak ada kemungkinan tingkat kesejahteraan

material dari anggota-anggotanya lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan material anggota rumah tangga yang jumlah anggota rumah tangga relatif lebih kecil.

Jadi, diketahui sejahtera bila pendapatan kepala keluarga lebih dari Rp.900.000 per bulan dan diketahui tidak atau kurang sejahtera bila pendapatan kurang dari Rp.100.000, sebagai mana dikemukakan oleh Komarudin (1997:62-63) adalah:

- 1) Kurang dari Rp.150,000 = Penghasilan sangat rendah
- 2) Rp.150,000-Rp.300,000 = Penghasilan rendah
- 3) Rp.300,000-Rp.450,000 = Penghasilan menengah 1
- 4) Rp.450,000-Rp.600,000 = Penghasilan menengah 2
- 5) Rp.600,000-Rp.750,000 = Penghasilan menengah 3
- 6) Rp.750,000-Rp.900,000 = Penghasilan tinggi 1
- 7) Rp.900,000-Rp.3,000,000 = Penghasilan tinggi 2
- 8) Lebih dari Rp.3,000,000 = Penghasilan tinggi 3

b. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam kesejahteraan, kesehatan dipengaruhi faktor makanan, frekuensi ketempat pelayanan kesehatan, tersedianya sarana penerangan listrik, air bersih, serta jamban dengan tangki septik, sebagaimana di kemukakan oleh Badan Pusat Statistik 2002 bahwa:

- 1) Tingkat kesehatan antara lain dipengaruhi faktor makanan, fasilitas kesehatan, dan ketersediaan tenaga medis.
- 2) Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah tersedianya sarana penerangan listrik, air bersih, serta jamban dengan tangki septik.

Jadi, tingginya tingkat kesehatan untuk mensejahterakan keluarga adalah terpenuhi atau tidak terpenuhinya indikator tersebut. Memiliki tingkat

kesehatan tinggi bila hanya dua faktor yang terpenuhi, dan tingkat kesehatan rendah bila ketiga faktor tersebut tidak terpenuhi.

c. Gaya hidup

Menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) mengelompokan gaya hidup keluarga berdasarkan tahapan pencapaian tingkat kesejahteraan dalam keluarga ada lima tahap, sebagaimana yang tercantum dalam Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Provinsi, Jawa Barat, (2003:18) mengelompokan gaya hidup keluarga berdasarkan menjadi lima tahapan pencapaian tingkat kesejahteraannya, yaitu:

- 1) Keluarga Pra Sejahtera, jika salah satu dari kelima indikator dibawah ini tidak terpenuhi :
 - a) Anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut.
 - b) Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
 - c) Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, tempat bekerja, sekolah, dan berpergian.
 - d) Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah, dan
 - e) Bila anak sakit atau Pasangan Usia Subur (PUS) ingin ber KB dibawa ke sarana kesehatan.
- 2) Keluarga Sejahtera I, jika salah satu dari sembilan indikator dibawah ini tidak terpenuhi :
 - a) Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.
 - b) Paling kurang seminggu sekali anggota keluarga makan daging, ikan dan telur.
 - c) Setahun sekali anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru.
 - d) Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni.
 - e) Tiga bulan terakhir anggota keluarga dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.
 - f) Ada anggota keluarga untuk 15 tahun ke atas berpenghasilan tetap.
 - g) Anggota keluarga 10-60 tahun bisa baca tulis latin.
 - h) Anak umur 7-15 tahun bersekolah.
 - i) PUS dengan anak hidup dua atau lebih, saat ini memakai alat kontrasepsi.
- 3) Keluarga Sejahtera II, jika salah satu dari tujuh indikator di bawah ini tidak terpenuhi yaitu :
 - a) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
 - b) Sebagian penghasilan keluarga ditabung.

- c) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
 - d) Keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
 - e) Keluarga berekreasi di luar rumah paling kurang sekali dalam enam bulan.
 - f) Keluarga memperoleh berita dari surat kabar/radio/TV/majalah,
 - g) Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi setempat.
- 4) Keluarga Sejahtera III, jika salah satu dari dua indikator di bawah ini tidak terpenuhi :
- a) Keluarga atau anggota keluarga secara teratur dengan sukarela memberi sumbangan material untuk kegiatan sosial,
 - b) Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan atau yaysan/institusi masyarakat.
- 5) Keluarga Sejahtera III Plus, jika seluruh dari indikator tahapan terpenuhi (23 indikator tahapan keluarga sejahtera).

3. Angka Partisipasi Sekolah

Menurut Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas, 2004) Indikator Angka Partisipasi Sekolah yang sering digunakan di bidang pendidikan yaitu:

- a. Angka Partisipasi Murni (APM) yaitu merupakan pengukur proporsi anak yang bersekolah pada kelompok umur tertentu pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umur tersebut. Angka Partisipasi Murni (APM) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah faktor sosial-ekonomi yang mempengaruhi anak dari penduduk yang bersekolah pada kelompok umur tertentu pada tingkatan yang sesuai dengan kelompok umur tersebut di Kecamatan Ngamprah.
- b. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan pengukur proporsi anak sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka Partisipasi Kasar (APK) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah faktor-faktor sosial-ekonomi yang mempengaruhi anak penduduk miskin yang sekolah pada jenjang pendidikan formal dalam kelompok umur tertentu.

Jadi, Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah di Kecamatan Ngamprah dapat dilihat dari Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar. Menurut Laporan Disdik Jabar (Depdik Jabar, 2005) faktor yang mempengaruhi APS yaitu:

- 1) Rendahnya jumlah anak tidak/belum sekolah dari keluarga tidak mampu,
- 2) Rendahnya angka melanjutkan sekolah karena faktor ekonomi,
- 3) Tingginya angka DO siswa karena faktor ekonomi dan
- 4) Rendahnya daya tampung sekolah.